

EFEKTIVITAS PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS KAWASAN PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI)

Dona Amelia¹⁾ dan Anisa Ulkhairat²⁾

Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi, Indonesia

email: [1donarondy@gmail.com](mailto:donarondy@gmail.com)

[2anisaulkhairat@gmail.com](mailto:anisaulkhairat@gmail.com)

ABSTRACT

This research relates to the Bukittinggi City Regional Regulation No. 03 of 2015 concerning public order and public peace, especially the regulation of street vendors. Satpol PP has the task of enforcing regional regulations and maintaining public order and public peacefulness and protecting the community. This study reveals the effectiveness of the role of Satpol PP in controlling street vendors. The research category is descriptive research. Method of analysis by using Importance Performance Analysis (IPA). Based on the results of the study, it can be seen that the effectiveness of the role of Satpol PP in controlling street vendors in Bukittinggi City is in favourable category. Optimizing the control of street vendors by providing socialization and regulation enforcement. The enforcement of the rules of the Satpol PP apparatus has been carried out well without using violence and being oppressive manners towards street vendors.

Keywords: *effectivity; satpol PP; street vendors*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hal yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 03 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terutama sekali pengaturan pedagang kaki lima. Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan efektivitas peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa efektivitas peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi dengan menggunakan analisis IPA (Importance Performance Analysis). Optimalisasi penertiban terhadap para pedagang kaki lima dengan cara memberikan Sosialisasi dan Penindakan. Penegakan aturan aparat Satpol PP sudah dilakukan dengan baik tanpa menggunakan kekerasan dan bersifat arogan kepada para PKL.

Kata kunci: *efektivitas; satpol PP; pedagang kaki lima*

Detail Artikel:

Diterima: 12 Agustus 2022

Disetujui: 16 Agustus 2022

DOI: [10.47896/mb.v3i1.514](https://doi.org/10.47896/mb.v3i1.514)

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu aparat Pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdapat dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok untuk ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, sehingga berhak untuk mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran yang ada terhadap Peraturan Daerah. Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini sudah diterapkan.

Namun kenyataan pelaksanaan ketertiban dan ketentraman belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda seperti para pedagang masih banyak yang menumpuk dagangan mereka mereka pada fasilitas umum akibatnya menghambat lalu lintas dan mengganggu para pengguna pejalan kaki serta banyak sampah yang berserakan karena aktivitas berjualan PKL tersebut.

Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dalam 6 bulan terakhir tercatat sebanyak kurang lebih 350 kali pelanggaran terjadi di Pasar Atas. Hal ini memicu datangnya laporan dari masyarakat karena terhambatnya jalan untuk pejalan kaki dan kendaraan yang berlalu lalang.

Selain itu keluhan dan kritikanpun timbul dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu kasus yang sering terjadi yaitu dalam upaya penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sering terjadi kerusuhan dan konflik sosial. Kehadiran PKL di wilayah Kota Bukittinggi merupakan realitas sosial yang sering menimbulkan permasalahan pada penataan fisik kota pada titik-titik tertentu di Pasar Atas Kota Bukittinggi diantaranya Jl. Minangkabau, depan Masjid Raya Bukittinggi, depan kawasan Jam Gadang dan dipelataran sekitaran Tugu Pahlawan Tak Dikenal dan Monumen Bung Hatta, serta permasalahan lingkungan.

Hal ini disebabkan lokasi yang digunakan untuk tempat berjualan para PKL menyalahi tata ruang kota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan secara otomatis hal ini menyebabkan kesan kumuh dan akibatnya berdampak pada pemandangan yang tidak baik dilihat dan mengganggu aktifitas umum. Dampak yang paling dirasa adalah alih fungsi trotoar yang seharusnya digunakan sebagai tempat pejalan kaki namun dijadikan sebagai tempat berjualan, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pejalan kaki.

Adapun fenomena yang berkembang adalah benturan represif yang justru terjadi seperti adu mulut yang tak bisa dihindari antara PKL dengan petugas, dan tak jarang para PKL juga memberontak pada petugas karena mereka tidak ingin diamankan ke kantor Satpol PP. Penolakan terhadap keberadaan kaki lima dan umumnya sektor informal terjadi di semua kota di Indonesia. Sebagai dampak utama urbanisasi, kaki lima diakui sebagai fenomena struktural yang akan terus ada. Gusur menggusur seolah sudah menjadi surat takdir dan nasib pedagang kaki lima (PKL). Hal ini menimbulkan rasa takut dan rasa cemas bahwa tempat usahanya akan terus digusur.

Berbagai kasus menunjukkan ada masalah selama ini mengenai posisi Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu muncul kesan bahwa keberadaan Satpol PP tidak sesuai dan dinilai negatif oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini dikarenakan Satpol PP yang harus menjalankan tugasnya dan melakukan kegiatan yang dimulai dari peringatan, penertiban, penindakan, dan pengusuran para PKL yang jelas-jelas melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi)

TELAAH LITERATUR

Pengertian Pelayanan Publik

Pengertian publik menurut Inu Kencana Syafi’ie, dkk (1999) yaitu “sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”.

Terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayan yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat non komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan kepada masyarakat (layanan publik atau umum) yang sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian.

Secara teoritis, tujuan pelayan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayan publik yang professional, kemudian Lijan Poltak Sinambela (2008:6) mengemukakan azas-azas dalam pelayan publik tercermin dari:

1. **Transparasi**
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas**
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. **Kondisional**
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. **Partisipatif**
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. **Keamanan Hak**
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.
6. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban**
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan, berdasarkan Kep. MENPAN No. 63 Th 2003 meliputi:

1. **Prosedur pelayanan**
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan.
2. **Waktu penyelesaian**
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3. Biaya pelayanan
Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk Pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan Prasarana
Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Pedagang Kaki Lima

Pemahaman pedagang kaki lima saat ini telah berkembang dan dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam pandangan pemerintah disebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah pelaku yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas social, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap (Permenagri nomor 41/2012 pasal 1).

Kegiatan pedagang kaki lima dalam sektor ekonomi yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
2. Pada umumnya unit usaha tidak memiliki ijin usaha.
3. Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerjanya.
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak menyentuh ke sektor tersebut.
5. Unit usaha mudah masuk dari sub sektor ke sub lain.
6. Teknologi yang digunakan bersifat tradisional.
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga relative kecil.
8. Pendidikan yang digunakan untuk menjalankan usaha tidak membutuhkan pendidikan khusus.
9. Pada umumnya unit usaha termasuk *one man enterprises*, dan jika mengerjakan buruh berasal dari keluarga.
10. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga tidak resmi.
11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi untuk masyarakat golongan berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga menengah.

Menurut Tri Kurniadi dan Hassel (2003) bahwa secara kasat mata perkembangan pedagang kaki lima tidak pernah terhenti seiring dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini membawa akibat positif dan negatif. Positifnya perdagangan terlihat dari fungsinya sebagai alternatif dalam mengurangi jumlah pengangguran serta dapat melayani kebutuhan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Negatifnya dapat menimbulkan masalah dalam pengembangan tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum dan timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini.

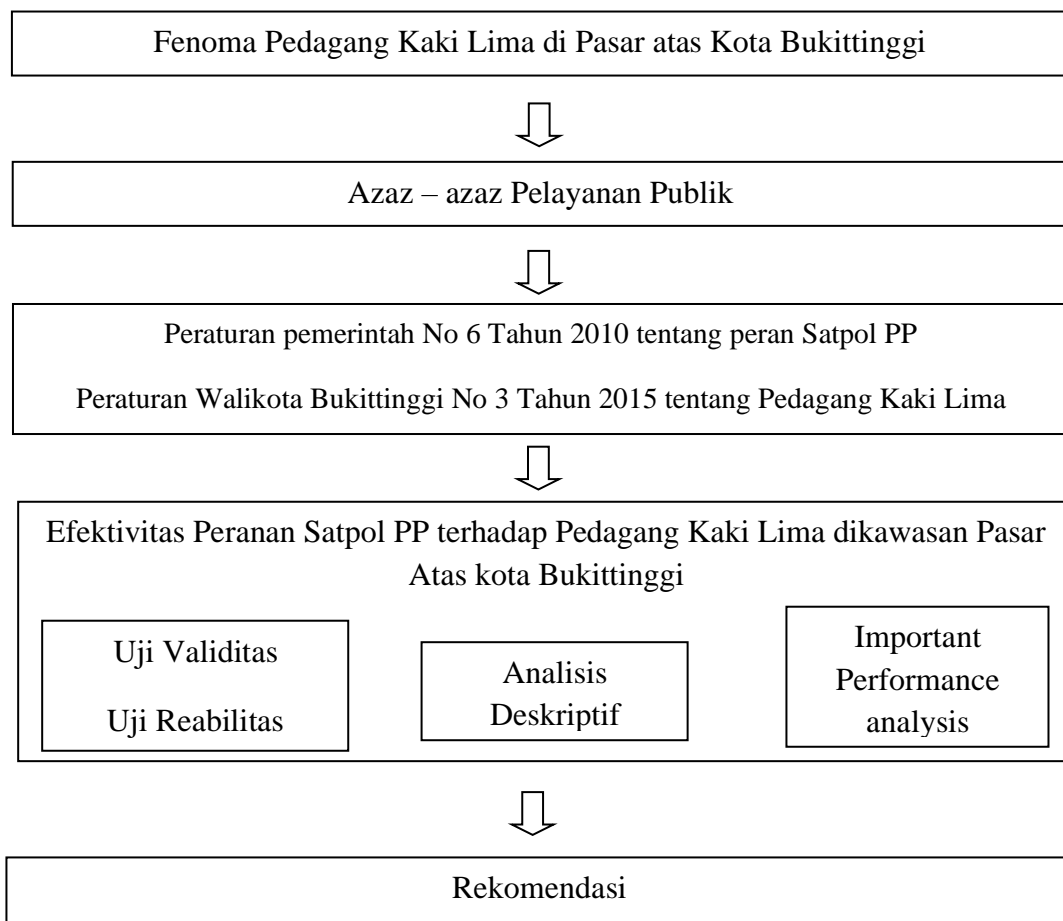
Efektivitas

Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani (1994) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Menurut pendapat Mahmudi (2005) mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara output dan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan. Semakin efektif organisasi, program atau kegiatan berfokus pada outcome (hasil). Program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini, seperti yang disajikan dalam gambar berikut ini:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana bertujuan untuk mengungkapkan kejadian fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi lokasi penelitian ini di kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi. Adapun objek penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang terdapat di sekitaran Pasar Atas Kota Bukittinggi. Penelitian ini melibatkan mitra Satpol PP (Dishub dan Satpam Pasar) sebagai informan untuk memudahkan penelitian dilapangan kuisisioner kepada para pedagang kaki lima secara langsung. Disamping menggunakan kuisisioner, penelitian ini juga melakukan pengumpulan data melalui observasi ke lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data yang tidak mungkin diperoleh dari kuisisioner.

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini melalui jurnal dan artikel yang terkait dengan efektivitas peran-peran Satpol PP dalam menerbitkan pedagang kaki lima, beserta laporan statistik.

Penelitian inin menggunakan *skala likert* yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial tertentu. Penggunaan skala likert dengan alternatif skor nilai 1-5 untuk mengukur sikap, dan pendapat.

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima dikawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi yang berjumlah 150 pedagang kaki lima. Jumlah tersebut tersebar dari kawasan depan Kebun Binatang hingga depan RM. Simpang Raya Pasar Atas. Waktu berjualan dilakukan dari pagi pukul 09.00 – 16.00 wib setiap hari. Adapun jumlah sampelpada penelitian ini adalah sebanyak 60 responden dengan rumus Slovin.

Metode uji kevalidan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi *product moment*. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Uji reliabilitas menggunakan uji statistik Cronbach's Alpha, dimana suatu instrumen dikatakan reliabel jika Cronbach's Alpha adalah diatas 0,6. Analisis TCR digunakan untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel. Untuk melihat efektifitas dari peran Satpol PP dalam pengelolaan pedagang kaki lima digunakan analisis *Importance Performance Analysis* (IPA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis tingkat kesesuaian dari efektifitas peranan Satpol PP dalam pengelolaan pedagang kaki lima di kota Bukittinggi dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$T_{ki} = \frac{X_i}{Y_i} \times 100\%$$

Penjelasan:

T_{ki} = Tingkat Kesesuaian.

X_i = Skor Penilaian Kinerja (*performance*).

Y_i = Skor harapan

Berikut ini disajikan perhitungan dari masing-masing dimensi pada variabel Efektifitas dan Peranan Satpol PP, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1
Perhitungan Tingkat Kesesuaian Masing-Masing Dimensi pada Variabel Efektifitas dan Peranan Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

| No | Variabel/Dimensi | (Y1) Skor Harapan | (X1) Skor Kinerja | TKI % |
|----|---|-------------------------|-------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| A | Efektifitas | | | |
| 1 | Relokasi bergadang yang dilaksanakan pemerintah melalui keterlibatan Satpol PP merupakan solusi yang tepat bagi PKL. | 257 | 229 | 89,11 |
| 2 | Penyediaan sarana dan prasarana yang dipantau oleh Satpol PP sudah dilaksanakan secara memadai bagi PKL. | 235 | 227 | 96,60 |
| 3 | Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Satpol PP dalam pembinaan PKL sudah berjalan baik. | 243 | 238 | 97,94 |
| 4 | Relokasi berdagang yang dilakukan oleh petugas Satpol PP sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | 252 | 241 | 95,63 |
| 5 | Dengan adanya alternative relokasi berjalan bagi PKL yang sudah diarahkan oleh Satpol PP kegiatan jualbeli berjalan baik. | 241 | 218 | 89,11 |
| B | Peranan Satpol PP | | | |
| 1 | Aparat Satpol PP berperilaku humanis dalam melaksanakan tugas. | 269 | 252 | 93,68 |
| 2 | Aparat Satpol PP dinilai arogan bagi pelanggar Perda walaupun sudah bertugas sesuai SOP. | 232 | 232 | 100 |
| 3 | Aparat Satpol PP memberikan sosialisasi yang jelas tentang peraturan berjalan. | 256 | 218 | 85,16 |
| 4 | Sosialisasi berdampak pada disiplin PKL. | 242 | 234 | 96,69 |
| 5 | Aparat Satpol PP melakukan penertiban tanpa pandang bulu. | 266 | 266 | 100 |
| 6 | Aparat Satpol PP menindak PKL yang sudah sering mendapatkan peringatan. | 271 | 273 | 100 |
| 7 | Penindakan yang dilakukan Aparat Satpol PP sudah menimbulkan efek jera bagi PKL. | 229 | 225 | 98,25 |
| 8 | Penindakan yang dilakukan aparat Satpol PP menimbulkan kesan arogan bagi para pelanggar. | 231 | 233 | 100 |

Merujuk hasil perhitungan tingkat kesesuaian/kepuasan pelanggan atas ke-8 atribut/dimensi yang digunakan untuk mengukur Peranan Satpol PP maka dapat dihitung rata-rata tingkat kesesuaian atas variabel Efektifitas Peranan Satpol PP, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 X &= (89,11\% + 96,60\% + 97,94\% + 95,63\% + 89,11\% + 93,68\% + 100\% + 85,16\% + 96,69\% \\
 &\quad + 100\% + 100\% + 98,25\% + 100\%) / 13 \\
 &= 96,92\%
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, *Importance Performance Analysis* terhadap pelaksanaan kinerja (*performance*) dengan tingkat kepentingan (harapan) dari dimensi-dimensi Efektifitas dan

Peranan Satpol PP Tingkat kepuasan dapat dilihat dari rata-rata nilai pelaksanaan kinerja (*performance*) (X) yang dilaksanakan, dengan kategori penilaian sebagai berikut:

1. Kelas:
 - a. Kelas tertinggi = 5
 - b. Kelas terendah = 1
2. Lebar Interval:

Rumus:

$$\text{Jarak Pengukuran} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Jumlah Interval}}$$

$$\begin{aligned} \text{Jarak Pengukuran} &= \frac{5 - 1}{5} \\ &= 0,80 \end{aligned}$$

3. Kategori:
 - Nilai 4,60 - 5,00 = Sangat memuaskan
 - Nilai 3,70 - 4,50 = Memuaskan
 - Nilai 2,80 - 3,60 = Cukup memuaskan
 - Nilai 1,90 - 2,70 = Kurang memuaskan
 - Nilai 1,00 - 1,80 = Tidak memuaskan

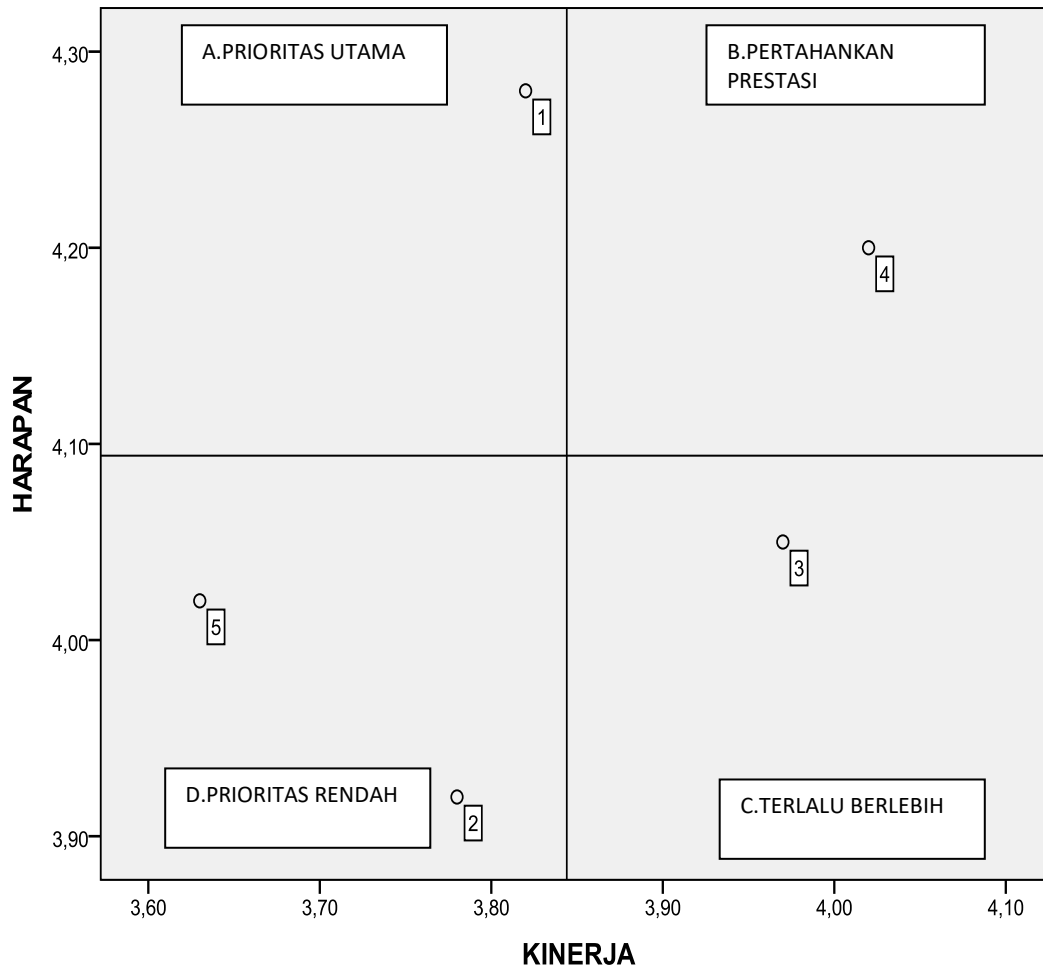
Perhitungan rata-rata nilai pelaksanaan kinerja (*performance*) (X) yang dilaksanakan perusahaan dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Perhitungan rata-rata penilaian pelaksanaan kinerja (*performance*) dengan kepentingan (harapan) pada masing-masing dimensi pada variabel Efektifitas dan Peranan Satpol PP

| No. | Variabel / Dimensi | (Yi) Skor Harapan | (Xi) Skor Kinerja | \bar{Y} | \bar{X} | Kategori Memuaskan |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Efektifitas | | | | | | |
| 1 | Relokasi bergadang yang dilaksanakan pemerintah melalui keterlibatan Satpol PP merupakan solusi yang tepat bagi PKL. | 257 | 229 | 4,28 | 3,82 | Memuaskan |
| 2 | Penyediaan sarana dan prasarana yang dipantau oleh Satpol PP sudah dilaksanakan secara memadai bagi PKL. | 235 | 227 | 3,92 | 3,78 | Memuaskan |
| 3 | Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Satpol PP dalam pembinaan PKL sudah berjalan baik. | 243 | 238 | 4,05 | 3,97 | Memuaskan |
| 4 | Relokasi berdagang yang dilakukan oleh petugas Satpol PP sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | 252 | 241 | 4,20 | 4,02 | Memuaskan |

| No. | Variabel / Dimensi | (Yi) Skor Harapan | (Xi) Skor Kinerja | \bar{Y} | \bar{X} | Kategori Memuaskan |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Dengan adanya alternative relokasi berjualan bagi PKL yang sudah diarahkan oleh Satpol PP kegiatan jual beli berjalan baik. | 241 | 218 | 4,02 | 3,63 | Memuaskan |
| | RATA-RATA | 245,6 | 230,6 | 4,09 | 3,84 | Memuaskan |
| B. Peranan Satpol PP | | | | | | |
| 1 | Aparat Satpol PP berperilaku humanis dalam melaksanakan tugas. | 269 | 252 | 4,48 | 4,20 | Memuaskan |
| 2 | Aparat Satpol PP dinilai arogan bagi pelanggar Perda walaupun sudah bertugas sesuai SOP. | 232 | 232 | 3,86 | 3,87 | Memuaskan |
| 3 | Aparat Satpol PP memberikan sosialisasi yang jelas tentang peraturan berjualan. | 256 | 218 | 4,27 | 3,63 | Memuaskan |
| 4 | Sosialisasi berdampak pada disiplin PKL. | 242 | 234 | 4,03 | 3,90 | Memuaskan |
| 5 | Aparat Satpol PP melakukan penertiban tanpa pandang bulu. | 266 | 266 | 4,43 | 4,43 | Memuaskan |
| 6 | Aparat Satpol PP menindak PKL yang sudah sering mendapatkan peringatan. | 271 | 273 | 4,52 | 4,55 | Memuaskan |
| 7 | Penindakan yang dilakukan Aparat Satpol PP sudah menimbulkan efek jera bagi PKL. | 229 | 225 | 3,82 | 3,75 | Memuaskan |
| 8 | Penindakan yang dilakukan aparat Satpol PP menimbulkan kesan arogan bagi para pelanggar. | 231 | 233 | 3,85 | 3,88 | Memuaskan |
| | RATA-RATA | 249,5 | 241,6 | 4,16 | 4,03 | Memuaskan |

Setelah dilakukan perhitungan pada masing-masing indikator/dimensi/atribut variabel penelitian, langkah selanjutnya adalah menggambarkan letak tingkat kepuasan pelanggan dalam masing-masing kuadran yang terdapat pada diagram kartesius. Dari masing-masing kuadran yang terdapat dalam diagram kartesius ini akan diketahui sejauh mana tingkat kinerja efektivitas dan Peranan Satpol PP yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Bukittinggi dan indikator/dimensi/atribut mana yang dianggap penting oleh pelanggan serta indikator/dimensi/atribut mana yang perlu diperbaiki oleh perusahaan tersebut di masa yang akan datang.



Gambar 2
Diagram Kartesius atas Kinerja dari Efektifitas Satpol PP

Berdasarkan diagram kartesius diatas menunjukkan bahwa:

1. Terdapat 1 (satu) indikator/dimensi/atribut dari variabel Efektifitas yang berada di **Kuadran A**, yaitu: Relokasi bergadag yang dilaksanakan pemerintah melalui keterlibatan Satpol PP merupakan solusi yang tepat bagi PKL dengan Nilai Harapan sebesar 4,28 dan Kinerja sebesar 3,82.
Hal ini berarti bahwa indikator/dimensi/atribut Relokasi bergadag yang dilaksanakan pemerintah melalui keterlibatan Satpol PP merupakan solusi yang tepat bagi PKL harus tetap menjadi Prioritas Utama.
2. Terdapat 1 (satu) indikator/dimensi/atribut dari variabel Efektifitas yang berada di **Kuadran B**, yaitu: Relokasi bergadag yang dilakukan oleh petugas Satpol PP sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan nilai harapan sebesar 4,20 dan kinerja sebesar 4,02.
Hal ini berarti bahwa indikator/dimensi/atribut Relokasi bergadag yang dilakukan oleh petugas Satpol PP sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Merupakan Prestasi yang harus tetap dipertahankan
3. Terdapat 2 (dua) indikator/dimensi/atribut dari variabel Efektifitas yang berada di **Kuadran C**, yaitu: Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Satpol PP dalam pembinaan PKL sudah berjalan baik dengan nilai harapan sebesar 4,05 dan kinerja 3,97.

2. Terdapat 3 (tiga) indikator/dimensi/atribut dari variabel Peranan Satpol PP yang berada di **Kuadran B**, yaitu:
 - a. Aparat Satpol PP berperilaku humanis dalam melaksanakan tugas. dengan nilai harapan sebesar 4,48 dan kinerja sebesar 4,20.
 - b. Aparat Satpol PP melakukan penertiban tanpa pandang bulu. dengan nilai harapan sebesar 4,43 dan kinerja sebesar 4,43.
 - c. Aparat Satpol PP menindak PKL yang sudah sering mendapatkan peringatan dengan nilai harapan sebesar 4,52 dan kinerja sebesar 4,55.

Hal ini berarti bahwa indikator/dimensi/atribut Aparat Satpol PP berperilaku humanis dalam melaksanakan tugas, Aparat Satpol PP melakukan penertiban tanpa pandang bulu dan Aparat Satpol PP menindak PKL yang sudah sering mendapatkan peringatan Merupakan Prestasi yang harus tetap dipertahankan

3. Tidak terdapat indikator/dimensi/atribut dari variabel Peranan Satpol PP yang berada di **Kuadran C**
4. Terdapat 4 (empat) indikator/dimensi/atribut dari variabel Peranan Satpol PP yang berada di **Kuadran D**, yaitu:
 - a. Aparat Satpol PP dinilai arogan bagi pelanggar Perda walaupun sudah bertugas sesuai SOP. dengan nilai harapan sebesar 3,86 dan kinerja sebesar 3,87.
 - b. Sosialisasi berdampak pada disiplin PKL. dengan nilai harapan sebesar 4,03 dan kinerja sebesar 3,90.
 - c. Penindakan yang dilakukan Aparat Satpol PP sudah menimbulkan efek jera bagi PKL. dengan nilai harapan sebesar 3,82 dan kinerja sebesar 3,75.
 - d. Penindakan yang dilakukan aparat Satpol PP menimbulkan kesan arogan bagi para pelanggar dengan nilai harapan sebesar 3,85 dan kinerja sebesar 3,88.

Hal ini berarti bahwa indikator/dimensi/atribut Aparat Satpol PP dinilai arogan bagi pelanggar Perda walaupun sudah bertugas sesuai SOP, Sosialisasi berdampak pada disiplin PKL, Penindakan yang dilakukan Aparat Satpol PP sudah menimbulkan efek jera bagi PKL dan Penindakan yang dilakukan aparat Satpol PP menimbulkan kesan arogan bagi para pelanggar merupakan Prioritas rendah yang harus ditingkatkan.

SIMPULAN

1. Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai efektifitas dan peran Satpol PP terhadap pedagang kaki lima di Pasar atas Kota Bukittinggi pada digram kartesius untuk kinerja diketahui pada Kuadran A bahwa Relokasi bergadag yang dilaksanakan pemerintah melalui keterlibatan Satpol PP merupakan solusi yang tepat bagi PKL. Kuadran B, yaitu Relokasi berdagang yang dilakukan oleh petugas Satpol PP sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kuadran C, yaitu Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Satpol PP dalam pembinaan PKL sudah berjalan baik. Kuadran D, yaitu Penyediaan sarana dan prasarana yang dipantau oleh Satpol PP sudah dilaksanakan secara memadai bagi PKL, Dengan adanya alternative relokasi berjualan bagi PKL yang sudah diarahkan oleh Satpol PP, kegiatan jual beli berjalan baik.
2. Pada diagram kartesius untuk kinerja diketahui pada Kuadran A, yaitu Aparat Satpol PP memberikan sosialisasi yang jelas tentang peraturan berjualan. Pada Kuadran B terdapat tiga indikator yaitu Aparat Satpol PP berperilaku humanis dalam melaksanakan tugas. Aparat Satpol PP melakukan penertiban tanpa pandang bulu. Aparat Satpol PP menindak PKL yang sudah sering mendapatkan peringatan, Aparat Satpol PP melakukan penertiban tanpa pandang bulu dan Aparat Satpol PP menindak PKL yang sudah sering mendapatkan peringatan Merupakan Prestasi yang harus tetap dipertahankan. Pada Kuadran C Tidak terdapat indikator/dimensi/atribut dari variabel Peranan Satpol PP. Pada Kuadran D terdapat

3 (tiga) variabel diantaranya Aparat Satpol PP dinilai arogan bagi pelanggar Perda walaupun sudah bertugas sesuai SOP. Sosialisasi berdampak pada disiplin PKL. Penindakan yang dilakukan Aparat Satpol PP sudah menimbulkan efek jera bagi PKL.

Saran

1. Terdapat 2 (dua) indikator/dimensi/atribut dari variabel Efektifitas yang berada di **Kuadran D**, yaitu:
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana yang dipantau oleh Satpol PP sudah dilaksanakan secara memadai bagi PKL.
 - b. Dengan adanya alternative relokasi berjualan bagi PKL yang sudah diarahkan oleh Satpol PP merupakan Prioritas rendah yang harus ditingkatkan.
2. Terdapat 4 (empat) indikator/dimensi/atribut dari variabel Peranan Satpol PP yang berada di **Kuadran D**, yaitu:
 - a. Aparat Satpol PP dinilai arogan bagi pelanggar Perda walaupun sudah bertugas sesuai SOP.
 - b. Sosialisasi berdampak pada disiplin PKL.
 - c. Penindakan yang dilakukan Aparat Satpol PP sudah menimbulkan efek jera bagi PKL.
 - d. Penindakan yang dilakukan aparat Satpol PP menimbulkan kesan arogan bagi para pelanggar. merupakan Prioritas rendah yang harus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Sambas Muhidin dan Abdurrahman Maman. 2009. Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian. Bandung: Pustaka Setia.
- Bejo Siswanto, 2012. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta Bumi: Aksara.
- Berry, David. 2003. Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danisworo, Mohammad & Widjaja Martokusumo (2000), "Revitalisasi Kawasan Kota Sebuah Catatan dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota". (www.urdi.org (urban and regional development institute, 2000)) diakses 2 Januari 2019 pukul 15.17.
- H.A.S Moenir. 1995. Manajemen Pelayanan Umum. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Handyaningrat, Soewarno. 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Haji Masagung.
- Hidayat. 1986. Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Inu Kencana Syafii dkk, 1999. Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Keban, T. Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja sektor publik yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Miftah Thoha. 2012. Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moenir. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004, "Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi", Gramedia, Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siswanto. 2012. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. Evaluasi Program. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Tri Kurniadi, Hessel Nogi s. Tangkilisan, 2003. Ketertiban Umum & PedagangKaki Lima Di Dki Jakarta. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Menpan No 63/KEP/M.PAN/7/2003

Perda Bukittinggi No 3 Tahun 2015

Permenagri nomor 41/2012 pasal 1.